

Daftar Isi

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
Halaman Persembahan	iv
Prakata	v
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xv
Daftar Grafik	xvi
Daftar Tabel	xvii
Daftar Singkatan	xx
Abstrak	xxiv
Abstract	xxv
Peta Provinsi Jambi	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	7
F. Metodologi Penelitian	22
G. Sistematika	31
BAB II KORAN LOKAL, DESENTRALISASI, DAN PERSEBARAN	
KAPITAL: TELAAH HISTORIS	33
A. Pendahuluan	33
B. Pers Politik, Pers Pembangunan, dan Pers Industri	33
C. Media Lokal dalam Lintasan Sejarah	40

D. Reformasi, Desentralisasi, dan Problem Ikutan	45
E. Kelangsungan dan Persebaran Modal	51
F. Penutup	56
 BAB III PROVINSI JAMBI PASCA-REFORMASI: KONTEKS	
EKONOMI-POLITIK	58
A. Pendahuluan	58
B. Sejarah Singkat hingga Reformasi	58
C. Reformasi dan Bangkitnya Lokalitas	63
D. Munculnya Elite Baru Politik Lokal: Warisan Lama?	67
E. Akumulasi Modal di Daerah	76
F. Korupsi di Tingkat Lokal	82
G. Penutup	85
 BAB IV GENEALOGI KORAN LOKAL DI JAMBI	87
A. Pendahuluan	87
B. Koran Lokal di Jambi sebelum Reformasi	87
C. Masuknya Jawa Pos Group	92
D. Koran-koran di Bawah Jawa Pos Group	95
E. Koran Lain di Luar Jawa Pos Group	102
F. Tribun Jambi: Menembus Dominasi	106
G. Koran Lokal: Spasialisasi, Bisnis, dan Politik	108
H. Penutup	116
 BAB V DUA MENARA KEMBAR INDUSTRI:	
SIRKULASI DAN IKLAN	118
A. Pendahuluan	118
B. Percetakan dan Oplah	119
C. Tantangan Sirkulasi: Jarak dan Pembaca	130
D. Iklan dan Pendapatan	136
E. Wartawan Sekaligus Agen Iklan dan Pemasar Koran	144

F. Pemerintah Daerah: Dari Pelanggan hingga Pengiklan	150
G. Sumber Pemasukan Lain: Event Organizer	155
H. Penutup	160
 BAB VI IKLAN DAN POLITIK: KISAH DUA PEMILU LOKAL	 162
A. Pendahuluan	162
B. Iklan dan Pemilu: Prawacana	164
C. Pilkada Provinsi Jambi 2010	169
D. Pilkada Serentak 2015	184
E. Strukturasi, Pembiayaan Kampanye, dan Politik Uang Melalui Koran Lokal	197
F. Penutup	204
 BAB VII ANGGARAN DAERAH UNTUK KORAN LOKAL: KORUPSI YANG LEGAL?	 206
A. Pendahuluan	206
B. Humas sebagai Pengelola Anggaran	206
C. Berapa Jumlah Anggaran untuk Koran Lokal?	213
D. Anggaran Humas dan Pilkada	226
E. Besar Pasak daripada Tiang: Anggaran yang (Selalu) Kurang	229
F. Utang yang Tak Terbayar: Bagaimana Penyelesaiannya?	232
G. Penutup	238
 BAB VIII DINAMIKA HUBUNGAN KORAN LOKAL- POLITIK LOKAL	 242
A. Pendahuluan	242
B. Batanghari Daerah Tertinggal	243
C. Zulkifli Nurdin Mundur dari PAN Jambi	247
D. Kisah Marah Ibu Gubernur: Sebuah Upaya Sensor-Diri?	252
E. Hubungan yang Selalu Kembali Baik	258

F. Konsekuensi dari Hubungan	262
G. Penutup	266
 BAB IX PENUTUP	 268
A. Ringkasan Temuan	268
B. Pokok-pokok Kesimpulan	272
C. Agenda Penelitian ke Depan	275
 Daftar Pustaka	 276